

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

<sup>1</sup>Ahmad Fadli, <sup>2</sup>Marliyah, <sup>3</sup>Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan

<sup>1</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, [ahmadfadly26052000@gmail.com](mailto:ahmadfadly26052000@gmail.com)

<sup>2</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, [marliyah@uinsu.ac.id](mailto:marliyah@uinsu.ac.id)

<sup>3</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, [fadhilahahmad@uinsu.ac.id](mailto:fadhilahahmad@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author : [ahmadfadly26052000@gmail.com](mailto:ahmadfadly26052000@gmail.com)

### *Abstract*

*This study aims to determine the level of financial performance in the Government of Langkat regency, North Sumatra province. The Data used is the Financial Report of the Langkat regency Regional Government in 2018-2020. The analysis technique used uses five ratios, namely the ratio of regional financial independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, compatibility ratio and growth ratio. The results showed that the financial independence ratio of Langkat regency has a very low performance, the effectiveness ratio is in the effective area, the efficiency ratio is not effective, the ratio of harmony/activity is not good and the growth ratio has a negative value.*

**Keywords:** Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Compatibility/Activity Ratio And Growth Ratio.

### **Pendahuluan**

Bentuk pengelolaan keuangan dalam otonomi daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD mengandung pengertian sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan menilai kinerja organisasi (Halim,2007:94).

Dengan menggunakan analisis rasio keuangan, pemerintah dapat mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dengan rasio kemandirian daerah, mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur kontribusi sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dengan rasio aktivitas/keserasian serta dapat mengetahui pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran dengan rasio pertumbuhan.

Pemerintah Kabupaten Langkat adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kawasan hutan lindung dan memiliki potensi sumber daya alam buatan. Salah satu permasalahan keuangan daerah lainnya yang dihadapi kabupaten Langkat adalah rendahnya kemampuan daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga penerimaan pendapatan asli daerah relatif rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer

(dana perimbangan). Pengembangan potensi wilayah Kabupaten Langkat tidak dapat dipisahkan bagian integral dari Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya serta sosial ekonomi masyarakat menekankan pengembangan pembangunan pertanian, pariwisata dan perdagangan.

Sebab pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu, disini pemerintah daerah juga diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut. Berikut adalah tabel pendapatan dan belanja Langkat selama 3 tahun anggaran :

**Tabel 1. Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 – 2020**

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit
2018	2.226.626.152.513,45	1.906.579.114.157,00	320.047.038.356,45
2019	2.361.512.739.444,63	2.224.061.799.667,64	137.450.939.776,99
2020	2.122.684.872.331,88	2.183.224.861.799,75	(60.539.989.467,87)

Sumber : Data Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Diolah)

Berdasarkan tabel 1 di atas, anggaran pendapatan Kabupaten Langkat tahun 2018 sebesar Rp2.226.626.152.513,45 dan belanja daerah sebesar Rp1.906.579.114.157,00 mengalami surplus. Tahun 2019 pendapatan mengalami peningkatan menjadi Rp2.361.512.739.444,63 dan belanja juga meningkat menjadi Rp2.224.061.799.667,64 mengalami surplus. Tahun 2020 pendapatan menurun menjadi Rp2.122.684.872.331,88 dan belanja daerah juga mengalami penurunan Rp2.183.224.861.799,75 namun terjadi defisit sebesar Rp60.539.989.467,87 atau sekitar 44,05% dari tahun 2019.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi menggambarkan perkembangan dari tahun ke tahun berupa hasil dalam pengelolaan aset-aset yang dimiliki. Rasio Efektivitas dan Efisiensi diukur untuk mengetahui realisasi pendapatan daerah.

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio ini mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

Rasio pertumbuhan menunjukkan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran serta kemampuan mempertahankan posisi ekonomi ditengah pertumbuhan ekonomi selama periode waktu tertentu. rasio ini digunakan untuk melihat pertumbuhan positif atau negatif dalam perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama satu periode tertentu.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian yang masih belum konsisten, menunjukkan adanya *research gap*. *Research gap* tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan sampel yang digunakan, adanya perbedaan hasil penelitian

terdahulu mengenai kinerja keuangan menarik untuk dilakukan penelitian kembali. Berdasarkan Pra Survey yang dilaksanakan oleh peneliti, peneliti ingin mengumpulkan data mendetail mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### Landasan Teori

#### Kinerja Keuangan Daerah

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam kegiatan otonomi daerah dan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pada daerah dimulai dari awal perencanaan hingga pengawasan keuangan daerah tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pusdiklat Pengawasan BPKP, 2011).

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah adalah :

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD} \times 100\%}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Tabel 2. Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75 %	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No. 13 Tahun 2006

#### Target PAD (Potensi Riil)

Kriteria Rasio Efektivitas PAD Menurut Mahsun (2012) adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektifitas berimbang
3. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Realisasi PAD

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentasi Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

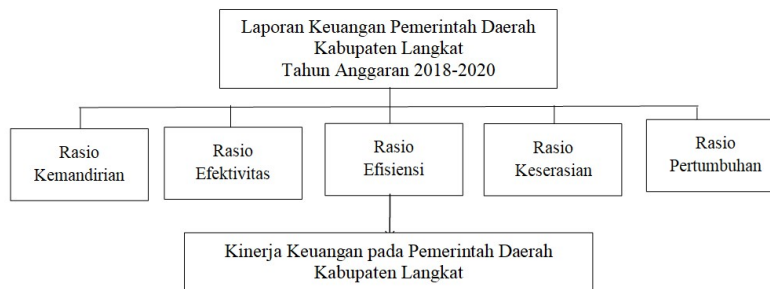
Sumber : Kepmendagri No. 13 Tahun 2006

Rasio Aktivitas/Keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD } t - t-1}{\text{Realisasi PAD } t-1} \times 100\%$$



Gambar I. Kerangka Konseptual

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan perhitungan – perhitungan rasio keuangan yang selanjutnya akan dianalisis dari hasil perhitungan tersebut sehingga dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2018-2020. Lokasi yang dipilih penulis sebagai tempat penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Republik Indonesia [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Data sekunder yang digunakan adalah data hasil laporan keuangan pemerintah kabupaten Langkat tahun 2018-2020. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat yang didapat dari situs resmi kementerian keuangan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) tahun 2018-2020.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah kabupaten Langkat tahun 2018-2020. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Langkat. Teknik pengolahan data menggunakan metode analisis data, untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 2020, maka dilakukan pengujian berdasarkan rasio tingkat kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas/keserasian dan rasio pertumbuhan untuk mengukur kinerja keuangan daerah, adapun rumusnya sebagai berikut:

**1. Rasio Kemandirian**

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD} \times 100\%}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

**2. Rasio Efektivitas**

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{PAD} \times 100\%}{\text{Target PAD (Potensi Riil)}}$$

**3. Rasio Efisiensi**

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi PAD}}$$

**4. Rasio Keserasian**

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Belanja Rutin} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$$

**5. Rasio Pertumbuhan**

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD } t - t-1 \times 100\%}{\text{Realisasi PAD } t-1}$$

### Hasil dan Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat untuk kurun waktu 2018-2020. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas/Keserasian Keuangan Daerah dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat yang didapat dari situs resmi kementerian keuangan. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

#### Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer dari pemerintahan pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2018-2020 dan dengan perhitungan rasio kemandirian yang diukur dengan akun Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pada Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan pinjaman dengan akun sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, akun penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, akun penerimaan kembali dari pinjaman / dana bergulir, dan penerimaan dari dana pihak ketiga maka dapat dihasilkan dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{136,680,578,541.45}{1,806,703,118,972.00} \times 100\% = 7.57\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{167,523,076,879.63}{1,732,852,882,496.00} \times 100\% = 9.66\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{168,843,723,199.88}{1,537,931,438,606.00} \times 100\% = 10.97\%$$

Besarnya rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Langkat tahun 2018 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Hasil Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2018-2020**

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2018	136,680,578,541.45	1,806,703,118,972.00	-	7.57%
2019	167,523,076,879.63	1,732,852,882,496.00	-	9.66%
2020	168,843,723,199.88	1,537,931,438,606.00	-	10.97%
		<b>Rata-rata</b>		9.40%

Sumber : Data yang diolah (2022)

Dilihat dari hasil perhitungan Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa tahun 2018 rasio kemandirian sebesar 7.57%; untuk tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9.66% dan tahun 2020 sebesar 10.97%. Kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2018 – 2020 memiliki rata – rata sebesar 9.40%.

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut :

**Tabel 5. Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75 %	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No. 13 Tahun 2006

Keterangan sebagai berikut :

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Dilihat dari Tabel 5 diatas, maka untuk Rasio Kemandirian Kabupaten Langkat yang diukur dalam 3 tahun, rata-rata menunjukkan angka 9.40% sangat rendah karena berada dalam rentang 0% - 25% yang dapat diartikan bahwa kondisi keuangannya bersifat instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi atau peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

#### Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{PAD}}{\text{Target PAD (Potensi Riil)}} \times 100\%$$

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2018-2020 dan dengan perhitungan rasio efektivitas yang diukur dengan akun realisasi penerimaan asli daerah (PAD) dan akun anggaran penerimaan asli daerah (PAD) maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{136,680,578,541.45}{144,050,847,030.00} \times 100\% = 94.88\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{167,523,076,879.63}{151,480,847,030.00} \times 100\% = 110.59\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{168,843,723,199.88}{163,480,847,030.00} \times 100\% = 103.28\% \end{aligned}$$

Besarnya rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Rasio Efektivitas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2018-2020**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2018	144,050,847,030.00	136,680,578,541.45	94.88%

2019	151,480,847,030.00	167,523,076,879.63	110.59%
2020	163,480,847,030.00	168,843,723,199.88	103.28%
		Rata-rata	102.92%

Sumber : Data yang diolah (2022)

Dilihat dari hasil perhitungan tabel 6 diatas pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Langkat yang diukur menggunakan rasio efektivitas dalam 3 tahun, yaitu tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2018 rasio efektivitas mengalami penurunan. Untuk tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 94.88% tahun 2019 sebesar 110.59% dan tahun 2020 sebesar 103.28.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah sebagai berikut. Kriteria Rasio Efektivitas PAD Menurut Mahsun (2012) adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektifitas berimbang
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif

Dilihat dari hasil perhitungan pada rasio efektivitas diatas Pemerintah Kabupaten Langkat yang diukur dalam 3 tahun, dimana tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2018 rasio efektivitas mengalami penurunan. Untuk tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 94.88% yang termasuk tidak efektif karena masih kurang dari 100%, tahun 2019 sebesar 110.59% dan tahun 2020 sebesar 103.28% yang termasuk dalam kategori efektif karena nilai lebih atau di atas 100%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya target realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung meningkat hanya tahun 2018 yang kurang dari 100%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dilihat dari rata-rata tahun 2018-2020 bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas menunjukkan angka 102.92% yang termasuk kriteria efektif artinya semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif.

### Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2018-2020 dan dengan perhitungan rasio efisiensi yang diukur pada biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan akun belanja yang direalisasikan dan akun realisasi penerimaan PAD maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{1,906,579,114,157.00}{136,680,578,541.45} \times 100\% = 1394.91\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{2,224,061,799,667.64}{136,680,578,541.45} \times 100\% = 1327.61\% \end{aligned}$$



$$\frac{167,523,076,879.63}{168,843,723,199.88} \times 100\% = 1293.04\%$$

Tahun 2020 = 2,183,224,861,799.75

Besarnya rasio efisiensi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Rasio Efisiensi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2018-2020**

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2018	1,906,579,114,157.00	136,680,578,541.45	1394.91%
2019	2,224,061,799,667.64	167,523,076,879.63	1327.61%
2020	2,183,224,861,799.75	168,843,723,199.88	1293.04%
		Rata-rata	1338.52%

Sumber : Data yang diolah (2022)

Dilihat dari hasil perhitungan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa dengan melihat rasio efisiensi yang dihasilkan Kabupaten Langkat memiliki nilai untuk tahun 2018 sebesar 1394.91%; tahun 2019 sebesar 1327.61%; dan tahun 2020 sebesar 1293.04%. Berdasarkan Tabel 7 rata-rata rasio efisiensi sebesar 1338.52% dari tahun 2018-2020, Kriteria untuk menetapkan efisiensi keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut :

**Tabel 8. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

Kriteria Efisiensi	Presentasi Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No. 13 Tahun 2006

Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan melihat rasio efisiensi yang dihasilkan Kabupaten Langkat memiliki nilai untuk tahun 2018 sebesar 1394.91%; tahun 2019 sebesar 1327.61%; dan tahun 2020 sebesar 1293.04%. Hasil rata-rata rasio efisiensi sebesar 1338.52% dari tahun 2018-2020, pada rasio efisiensi terletak pada lebih dari 100% maka dinyatakan tidak efisien.

### Rasio aktivitas/Keserasian

Rasio Keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2018-2020 dan dengan perhitungan rasio keserasian yang diukur pada total belanja rutin dengan akun belanja yang direalisasikan dan total APBD dengan anggaran PAD maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = 1,059,328,633,268.00 \times 100\% = 47.57\%$$

2,226,626,152,513.45	
Tahun 2019 = 1,079,112,528,480.00	x 100% = 45.69%
2,361,512,739,444.63	
Tahun 2020 = 1,066,541,110,224.00	x 100% = 50.24%
2,122,684,872,331.88	

Besarnya rasio aktivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9. Rasio Aktivitas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2018-2020**

Tahun	Belanja Rutin (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Aktivitas (%)
2018	1,059,328,633,268.00	2,226,626,152,513.45	47.57%
2019	1,079,112,528,480.00	2,361,512,739,444.63	45.69%
2020	1,066,541,110,224.00	2,122,684,872,331.88	50.24%
		Rata-rata	47.83%

Sumber : Data yang diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa perhitungan rasio keserasian Pemerintah Kabupaten Langkat untuk tahun 2018 sebesar 47.57%; 2019 sebesar 45.69% dan 2020 sebesar 50.24%. Hasil rata – rata sebesar 47.83% menyatakan sebagian besar dana yang dimiliki Kabupaten Langkat tergolong bagus karena dibawah 50% sesuai teorinya semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil dan sebaliknya.

### Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negative. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD } t - t-1}{\text{Realisasi PAD } t-1} \times 100\%$$

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2018-2020 dan dengan perhitungan rasio pertumbuhan yang diukur dengan akun realisasi penerimaan PAD tahun sekarang dan tahun sebelumnya maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{167,523,076,879.63 - 136,680,578,541.45}{136,680,578,541.45} \times 100\% = 22.56\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{168,843,723,199.88 - 167,523,076,879.63}{167,523,076,879.63} \times 100\% = 0.78\% \end{aligned}$$

Besarnya rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2018-2020**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi PAD t-1 (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)
2018	136,680,578,541.45	-	-
2019	167,523,076,879.63	136,680,578,541.45	22.56%
2020	168,843,723,199.88	167,523,076,879.63	0.78%
		Rata-rata	7.78%

Sumber : Data yang diolah (2022)

Dilihat dari hasil perhitungan pada rasio pertumbuhan diatas pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Langkat yang diukur dalam 3 tahun, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan. Untuk tahun 2019 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 22.56% dan tahun 2020 sebesar 0.78%. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Langkat untuk tahun 2018-2020 merupakan pertumbuhan negatif karena cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Langkat.

## Pembahasan

### 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2018-2020.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dilihat dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa tahun 2018 rasio kemandirian sebesar 7.57%; tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9.66% dan tahun 2020 sebesar 10.97% dan memperoleh rata-rata sebesar 9.40%. Rasio Kemandirian Daerah merupakan gambaran dari tergantungnya daerah terhadap tingkat partisipasi oleh masyarakat dalam bidang pembangunan daerah.

Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Rasio kemandirian juga mengerah digambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga menunjukkan bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi juga peran masyarakat dalam membayar retribusi dan pajak daerah yang merupakan komposisi paling penting pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar retribusi dan pajak akan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di masyarakat juga semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhri (2016) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaur juga rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif atau sangat rendah dimana pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati (2017) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah selama 7 (tujuh) tahun pada Kota Bandung memiliki rata-rata tingkat kemandirian cukup tinggi, dan dalam kategori kemampuan keuangan "Cukup" dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah daerah "sangat dominan" dari pada pusat, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang

dihasilkan sudah di antara 50-75%. Rasio kemandirian yang sudah cukup tinggi berdampak pada kemampuan keuangan daerah Kota Bandung dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan dapat dikatakan cukup mandiri meskipun dari pembiayaan tersebut masih membutuhkan bantuan pusat.

## **2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat diukur dengan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada tahun 2018-2020**

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Langkat yang diukur dalam 3 tahun menunjukkan bahwa tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2018 rasio efektivitas mengalami penurunan. Untuk tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 94.88% yang termasuk tidak efektif karena masih kurang dari 100%, tahun 2019 sebesar 110.59% dan tahun 2020 sebesar 103.28% yang termasuk dalam kategori efektif karena nilai lebih atau di atas 100%. Untuk tahun 2018-2020 memiliki rata-rata 1338.52%. Kinerja Keuangan dilihat dari rasio efektivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Hasil rata-rata 1338.52% termasuk kedalam kategori kriteria efektif karena berada di atas 100% yang menggambarkan pemerintah daerah sudah efektif dalam mengoptimalkan pencapaian target - targetnya dengan potensi riil yang sudah ditetapkan. Rasio Efektivitas yang efektif menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2010) bahwa dilihat dari rasio efektivitas keuangan daerah Kota Surakarta termasuk kategori efektif karena mampu merealisasikan PAD di atas target PAD yang seharusnya. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis (2017) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah Pemda Kota Bandung belum efektif yang sesungguhnya karena rasio efektifitasnya sebagian besar belum mencapai angka 1 (satu) atau 100 (seratus) persen, sementara untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 hasil rasio efektifitasnya sudah mencapai batas minimal 100%.

## **3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat yang diukur dengan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2018-2020**

Kinerja keuangan berdasarkan rasio efisiensi Kabupaten Langkat memiliki nilai untuk tahun 2018 sebesar 1394.91%; tahun 2019 sebesar 1327.61%; dan tahun 2020 sebesar 1293.04% dengan rata-rata sebesar 1338.52% untuk tahun 2018-2020. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Pemerintah daerah perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatannya efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan, meskipun Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai target yang ditetapkan, namun ternyata biaya untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari capaian pendapatannya, maka itu menjadi sia-sia.

Hasil Penelitian menunjukkan rasio efisiensi terletak pada lebih dari 100% maka dinyatakan tidak efisien. Rasio Efisiensi yang tidak efisien menggambarkan

kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat. Berbagai kemungkinan tidak efisiennya pemerintah daerah Kabupaten Langkat dalam merealisasikan belanja daerah dan pendapatan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah yaitu terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja. Pemerintah daerah perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatannya efisien atau tidak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liantino (2018) yang menyatakan bahwa pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan keuangannya tidak efisien jika dilihat dari rasio efisiensi sehingga disarankan untuk mengurangi besaran belanja yang dikeluarkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anis (2017) menyatakan bahwa sehingga hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Surabaya telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 karena rasio efisiensi masih dibawah 100%.

#### 4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat yang diukur dengan Rasio Aktivitas/ Keserasian Keuangan Daerah pada tahun 2018-2020

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan rasio keserasian Pemerintah Kabupaten Langkat untuk tahun 2018 sebesar 47.57%; 2019 sebesar 45.69% dan 2020 sebesar 50.24%. Hasil rata – rata sebesar 47.83% menyatakan sebagian besar dana yang dimiliki Kabupaten Langkat tergolong bagus karena dibawah 50%.

Rasio Aktivitas/Keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Kinerja keuangan dilihat dari rasio keserasian (belanja) rata-rata sebesar sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Langkat untuk tahun 2018 dan 2019 tergolong bagus karena dibawah 50% sedangkan untuk tahun 2020 masih digunakan untuk kebutuhan belanja operasi karena diatas 50%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendrawati (2017) bahwa rasio aktivitas Pemerintah Kota Bandung memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

#### 5. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat yang diukur dengan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah pada tahun 2018-2020

Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Langkat yang diukur dalam 3 tahun, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan. Untuk tahun 2019 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 22.56% dan tahun 2020 sebesar 0.78%. Rata –rata rasio pertumbuhan adalah 7.78%

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Hal tersebut didukung dengan teori Public Finance yang menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan dan mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan dengan baik. Kemampuan suatu

daerah dalam memperoleh sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal dapat membentuk suatu daerah menjadi mandiri, sehingga daerah tersebut tidak selalu bergantung pada pendapatan transfer yang diberikan oleh pusat.

Pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2018-2020 merupakan pertumbuhan negatif karena cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata 7.78%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Langkat tidak mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode di karenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Langkat. Pemerintah daerah Kabupaten Langkat dikatakan pertumbuhan negatif karena dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai selama beberapa periode pemerintah daerah Kabupaten Langkat belum mampu mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu diperhatikan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis (2017) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam hal pertumbuhan pendapatan dikatakan pertumbuhannya positif, karena setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 jumlah realisasi pendapatan daerah baik dari PAD maupun TPD selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

## Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian memperoleh rata-rata sebesar 9.40% menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat rendah.
2. Kinerja keuangan dilihat dari rasio efektifitas dalam mengelola pendapatan asli daerahnya memperoleh rata-rata sebesar 102.92% menunjukkan bahwa kinerja keuangan termasuk kriteria efektif.
3. Kinerja keuangan dilihat dari rasio efisiensi dengan rata-rata sebesar 1338.52% menunjukkan nilai lebih dari 100% dinyatakan tidak efisien.
4. Kinerja keuangan dilihat dari rasio keserasian (belanja) rata-rata sebesar 47.83% menunjukkan nilai dibawah 50% dinyatakan bagus.
5. Kinerja keuangan dilihat dari rasio pertumbuhan Kabupaten Langkat untuk tahun memperoleh rata – rata sebesar 7.78% menunjukkan pertumbuhan negatif yakni cenderung mengalami penurunan.

### Saran

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah  
Disarankan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat memperhatikan potensi PAD dan mengambil kebijakan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya dimasa yang akan datang.
2. Bagi Peneliti Lain  
Untuk penelitian yang akan datang perlu dilanjutkan kembali penelitian di bidang yang sama dengan menambah objek tempat atau tahun penelitian untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah lainnya.
3. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Langkat lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan

meningkatkan belanja modal. Ini dilakukan untuk memperbaiki rasio keuangan pada Kabupaten tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Alvionita, Wenny. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros", Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2009.
- Armaja, dkk. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan." *Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3, No. 2, 2015: 171.
- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Azis, Asmaul. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *EKSIS*, Vol. XI, No. 1, 2016: 90.
- Chee, Daud Vicary Abdulah dan Keon. *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Jakarta: Zaman, 2012.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edward Tanujaya, Yogyakarta.
- Handayani, Anis Karlina dan Nur. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015." *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 3, 2017: 913.
- Harahap, Heri Faisal. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah*. Universitas Andalas. 2020
- Harimurti, Dewi SPA dan Fajar. "Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar." *Eksplorasi*, Volume XXIX, No.2, 2017: 16.
- Hengki Syahyunan, Khairuddin Hasibuan, Edy Pane, Suwito, M.S.F.L. (2023) 'ANALYSIS OF STATE FINANCIAL LOSS RETURNS BY VILLAGE GOVERNMENT APPARATUS IN LABUHANBATU UTARA DISTRICT', *International Journal of Economy, Computer, Law, Management and Communication (IJECK)*, 4852(1), pp. 8–15.
- Hengki Syahyunan, Khairuddin Hasibuan, Hilaman Arfandy Siregar, Edy Pane, L. (2022) 'PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT', *Advokasi*, 10(02), pp. 230–240. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.4179>.
- Heykal, Nurul Huda dan Muhamad. *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibnu Syamsi. 1986. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Iqbal, Abdul Halim dan Muhamad. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Karlina Anis dan Handayani Nur, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012- 2015" dalam *Jurnal: Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 3 (Maret, 2017), 916.

- Liantino, Wita dkk. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah di Kota Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018
- Mahmudi., 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Mamesah. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marina F. Pandjaitan, dkk. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016." *Jurnal Emba*, Vol.6 No.3, 2018: 1399.
- Mursyidi. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Nur athiyah Rahma, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Prangkat Daerah (SKPD) di Kota Palu", (*Jurnal Katalogis Universitas Tadulako*, Vol.4 No. 9, 2016), h. 18.
- Pane, E. (2023). Peranan Kejaksaaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1419-1430. doi:<https://doi.org/10.47679/ib.2023579>.
- Pankey, Aldy H.R dkk. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2012-2015. Universitas Sam Ratulangi Manado. 2017
- Pramono Hariadi, dkk. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Sohibi, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1453-1478. doi:<https://doi.org/10.47679/ib.2023588>.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji dan. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumarjo, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010), h. 112.
- Sunarji Harahap, Pengantar Manajemen, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h.319
- Susilowati, dkk. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013-2015." *Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 12, No. 2, 2016: 232.
- Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Antapani. 2007.
- Wilantari, Wening. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zuhri, Muhammad dkk. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Universitas Dehasen Bengkulu. 2016.